



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/bsg -KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) DAN  
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI RUANG LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengelolaan pelayanan pengaduan publik nasional perlu meningkatkan penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan Informasi Publik sebagai hak warga Negara, dan membantu menindaklanjuti laporan yang masuk pada aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) maka dipandang perlu untuk menugaskan operator pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
  8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (Berita daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2020);

**MEMUTUSKAN:**

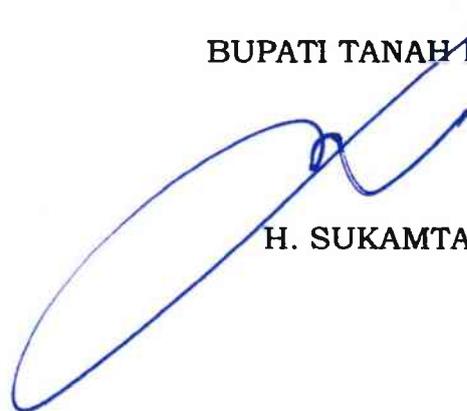
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan tanggung Jawab Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
  - b. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi (Daftar Informasi Publik) dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;
  - c. mengoperasikan penggunaan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
  - d. menyampaikan Laporan yang masuk kepada pejabat penghubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) untuk mendapatkan bahan untuk menindak lanjuti laporan; dan
  - e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Pejabat

Penghubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi Publik penanganan Laporan yang masuk pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) kepada publik;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 188.45 /659 - KUM / 2022  
 TANGGAL : 11 April 2022

DAFTAR NAMA OPERATOR PPID DAN LAPOR PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH  
 LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

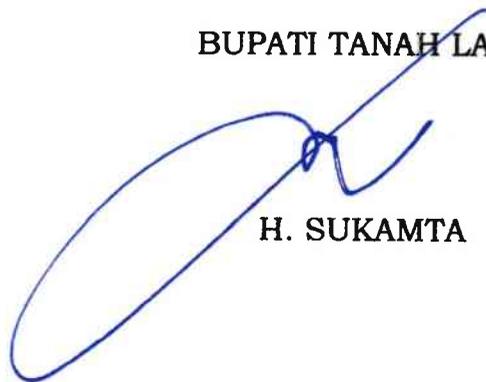
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN	SKPD
1	ANNDRI SETIAWAN, S, Kom	Penata Tingkat 1	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	KUSBAWATI, S.KoM	PTT	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	MURNIYATI, S.Pd	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	OPERATO R PPID	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTMAINNA, S.Pd		OPERATO R LAPOR	
4	MUHAMMAD IRWANSYAH		OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Badan Pendapatan Daerah
5	HARRY HARIYANTO	Kassubbag Umum dan Kepegawaian	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	MUHAMMAD APRIANNOR, SP	PTT OPERATOR KOMPUTER	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	DEDY WALUYO, A.Md	PENGATUR	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	RAJIB PERDANA RUSADY, A.Md	PENGATUR	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	FATHAN MAHMUDI, S.Kom	-	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Kesehatan
11	REO SUFANGKEI	-	OPERATO R PPID	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	HAIRUNISA, S.Pi	-	OPERATO R LAPOR	
12	MUHAMMAD PERI		OPERATO R PPID OPERATO	Dinas Komunikasi dan Informatika

			R LAPOR	
13	MAHFUDIN IMAN, A.Md	-	OPERATO R PPID	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	TRI NOORLINDA, A.Md	-	OPERATO R LAPOR	
14	RISKA SURYANITA, SE	Penata Muda	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Pariwisata
15	TASPIATI	-	OPERATO R PPID	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	PURWATI IMA RIANI	-	OPERATO R LAPOR	
16	ANSHARI RAHMAN SALEH	PTT Pada Sub Umum dan Kepegawaian	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	RIFQI IHSANI, A.Md	Pengadminist rasi pada di Sekretariat	OPERATO R PPID	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	MUHAMMAD RIDHO ADRIANI, S.AP	Pemroses Perizinan Back Office	OPERATO R LAPOR	
18	WIDANIA RAHMATINA, S.Pd	-	OPERATO R PPID	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	ANNISA YULIA RAKHMAH	-	OPERATO R LAPOR	
19	ALMIRA NUR RAHMI	PTT	OPERATO R PPID	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	FITRIANA DWI FEBRIYANTI	PTT	OPERATO R LAPOR	
20	DARYONO, A.Md	Kasubbag Perencana dan Keuangan	OPERATO R PPID	Dinas Perhubungan
	EKO SLAMET RAHARJO, A.Ma	Penguji Pelaksana Lanjutan	OPERATO R LAPOR	
21	MUHAMMAD FIRDAUS, S.Pd.I	PTT Pelaksana Administrasi Umum	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
22	IRWAN RIYADI	PTT	OPERATO R PPID	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	MUHAMMAD SYAHPUTRA	PTT	OPERATO R LAPOR	
23	FACHRUDIN AZIZ, S.Pt	Penata Muda TK I	OPERATO R PPID OPERATO R LAPOR	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24	NOOR MITA IMANDASARI, A.Pi,	Penata TK.I	OPERATO R PPID	Dinas Sosial

	MM		OPERATOR LAPOR	
25	MUHAMAD MUKHOLIK, S.H	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
26	MUHAMMAD MUSLIH AMIRUDIN, A.Md.Kom	-	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
27	IRIANI	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Inspektorat Kabupaten
28	SUWARDI	-	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29	KATHARINA SISWI WIDYAWATI, S.Kom	Penata Muda	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Sekretariat Daerah
30	M. REZA FAHLEVI, S.I.Kom	Analisis Publikasi	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Sekretariat DPRD
31	NOR HASANAH, SM	-	OPERATOR LAPOR	Kecamatan Kurau
	SALAMAH, S.H.I		OPERATOR PPID	
32	USMAN JANATIN	Pengadministrasi umum	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Bati-Bati
33	YUNISKA FITHRIYYAH, A.Md	Pengatur	OPERATOR PPID	Kecamatan Tambang Ulang
34	HILAIYAH, SE	PTT	OPERATOR LAPOR	
35	ARIS UTOMO, A.Md.Pjk	Pengatur Tingkat I		Kecamatan Pelaihari
36	LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE	Penata Muda TK. I		Kecamatan Bajuin
	FERRY ANANDA, A.Md, Pjk	Pengatur TK. I		
37	NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md	Pengelola Data Layanan	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Batu Ampar
38	ARDIANSYAH, A,MK	KASI PELAYAN	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Panyipatan
39	DWI WURYANTI, S.Kom		OPERATOR PPID	Kecamatan Takisung

			OPERATOR LAPOR	
40	MARLINA, SE	Penata Muda TK. I	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Jorong
41	YUSRIL ADI SUSILO	-	OPERATOR PPID	Kecamatan Kintap
42	JAMILAH	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Bumi Makmur
43	BUDI SULISTIYO	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	RSUD Hadji Boejasin
44	MERDEKA PUTRI IRNANDA, SH	PTT Pelaksana Administrasi	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	UPT RSUD KH MANSYUR
45	AMAR MARUF, A.Md	Kepala Seksi Hubungan Langgan	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Perusahaan Daerah Air Minum PDAM

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA